

Strategi Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat Agraris Di Kawasan Pedesaan

Mirdha Fahlevi SI^a, Yusnaidi^b, Amsal Irmalis^c

^{a,b,c} Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

Corresponding author email: mirdha.fahlevi@utu.ac.id

Abstract

The government's objective to increase financial literacy and inclusion should be supported by the stakeholders. The increasing of financial inclusion and literacy play important role to generate community livelihood. Currently, the level of financial inclusion and literacy in Indonesia are diverse. It depends on many factors such as where they are living, in urban area or country site. In urban areas, the financial literacy index reaches 41.41 percent and the level of financial inclusion reaches 83.60 percent. On the other hand, in rural areas the financial literacy index only 34.53 percent and the level of financial inclusion only reaches 68.49 percent. These statistics information show the lack of financial inclusion and literacy among rural community who most of them work as farmers and fishermans. Therefore this research is conducted through desk research methods to examine factors which cause the lack of financial inclusion and literacy within agrarian society. The research offers the strategic plan to improve financial inclusion and literacy index within three years period, which are divided into three phases. The first one is called as the phase of educating community, the second phase is the penetration of financial institution and the last phase is expanding the access of financial services to the agrarian society. This road map is one of the alternative strategy that could be adopt to improve the financial inclusion and literacy and to support government development program.

Keywords: Financial Literacy, Financial Inclusion, Agrarian Society.

Abstrak

Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan cita-cita pemerintah yang patut kita dukung bersama. Peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan merupakan faktor penting dalam menggerakkan denyut nadi perekonomian masyarakat. Tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan di tanah air masih sangat beragam. Kawasan perkotaan, indeks literasi keuangan mencapai angka 41,41 persen. Adapun tingkat inklusi keuangan menembus angka 83,60 persen. Sedangkan masyarakat di kawasan pedesaan, indeks literasi keuangan hanya mencapai 34,53 persen dengan tingkat inklusi keuangan berada pada posisi 68,49 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat pedesaan yang notebene sebagai masyarakat agraris. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *desk research* untuk menginventarisir berbagai faktor penyebab rendahnya literasi keuangan kelompok masyarakat tersebut. Penelitian ini menawarkan rencana strategis upaya peningkatan literasi keuangan selama tiga tahun yang terbagi dalam tiga fase. Fase pertama adalah edukasi masyarakat, fase kedua berupa penetrasi lembaga keuangan dan fase ketiga berupa perluasan akses produk jasa keuangan kepada masyarakat agraris. *Road map* tersebut merupakan salah satu opsi strategi yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Masyarakat Agraris.

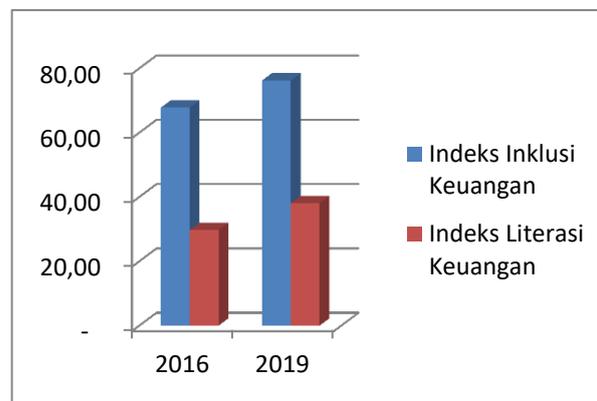
1. Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia bertekad melakukan peningkatan literasi keuangan masyarakatnya sebagai salah satu agenda pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan berbagai akses layanan keuangan yang dapat dinikmati oleh berbagai komponen masyarakat di Indonesia. Pembangunan literasi keuangan merupakan komponen penting dalam rangka menggairahkan perekonomian negara. Ketersediaan akses terhadap lembaga keuangan mendorong masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi produktif melalui berbagai kegiatan usaha.

Global Financial Inclusion Index pada tahun 2017 merilis bahwa hanya sekitar 48,9% masyarakat dewasa di tanah air yang memiliki rekening bank (Demirguc, Klapper, Singer, Ansar, dan Hess, 2018). Data tersebut dapat kita pahami bahwa tidak sampai setengah masyarakat Indonesia yang mempunyai akses terhadap lembaga keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut pemerintah perlu melakukan berbagai upaya pembenahan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan inklusi keuangan dan literasi keuangan di tanah air, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang strategi nasional keuangan inklusif (SNKI). Regulasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan di tanah air. Kehadiran peraturan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan. Perpres juga menetapkan tujuh pilar peningkatan literasi keuangan masyarakat yang meliputi pendidikan keuangan, hak kepemilikan warga negara, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, jasa keuangan di sektor pemerintahan, perlindungan konsumen, peraturan dan infrastruktur (Perpres Nomor 82 Tahun 2016).

Fakta lainnya juga dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 lalu. Berdasarkan laporan OJK, indeks literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 38,03 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sudah mencapai 76,19 persen. Jika dibandingkan dengan hasil survey serupa pada tahun 2016, tingkat inklusi dan literasi keuangan di tanah air mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, tingkat literasi keuangan hanya 29,7 persen dengan tingkat inklusi keuangan yang hanya mencapai 67,8 persen (OJK, 2019). Grafik berikut ini menyajikan perkembangan literasi keuangan dan inklusi di Indonesia.

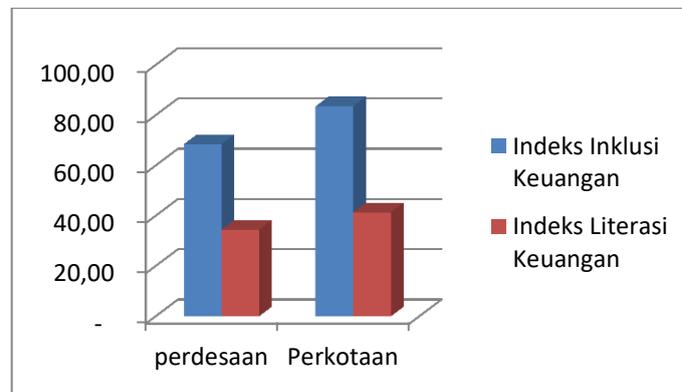


Gambar 1.1 Perbandingan Indeks Literasi Keuangan dan Indeks inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia Tahun 2016-2019

Berdasarkan dua hasil survey terakhir yang telah dilakukan OJK, terdapat ketimpangan antara tingkat literasi keuangan dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan. Indeks inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi keuangan. Angka tersebut merupakan indikasi bahwa jumlah masyarakat yang telah dapat mengakses layanan perbankan lebih tinggi di bandingkan dengan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Dengan kata lain, tidak semua masyarakat yang telah dapat mengakses layanan lembaga keuangan, memahami dengan baik pengetahuan dasar tentang keuangan. Oleh sebab itu, edukasi keuangan mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk memaksimalkan tingkat inklusi keuangan di tanah air.

Otoritas Jasa Keuangan juga merilis bahwa terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan antara masyarakat di kasawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Masyarakat di kawasan pedesaan, tingkat literasi keuangannya lebih rendah dibandingkan dengan literasi keuangan masyarakat di kawasan perkotaan. Tingkat literasi keuangan masyarakat di daerah perkotaan

mencapai 41,41 persen dengan indeks inklusi keuangannya 83,60 persen. Adapun tingkat literasi keuangan masyarakat di kawasan pedesaan hanya mencapai 34,53 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan hanya berada pada angka 68,49 persen. Grafik berikut ini menyajikan perbedaan literasi dan inklusi keuangan masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan sebagai berikut.



Gambar 1.2 : Grafik Perbandingan Indeks Literasi Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan Masyarakat Berdasarkan Kawasan Domisili Tahun 2019

Fenomena masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat di kawasan pedesaan yang notabene sebagai masyarakat agraris mendorong kami untuk melakukan *desk research* dalam rangka mengeksplorasi berbagai faktor penyebabnya. Inventarisir berbagai faktor penyebab akan memudahkan dalam menyusun *action plan* peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat agraris. Harapannya, penelitian ini dapat memberi gambaran awal tentang berbagai faktor penyebab perbedaan tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat serta tawaran solusi berupa *master plan* peningkatan inklusi keuangan masyarakat agraris.

2. Kajian Teori

2.1 Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang di bidang pengelolaan keuangan yang dapat memandu mereka dalam membuat keputusan keuangan secara efektif (Huston, 2010). Masyarakat yang mempunyai tingkat literasi keuangan yang baik akan dapat menyusun perencanaan yang baik sebagai modal dalam membangun kesejahteraan mereka. Literasi keuangan yang memadai ditandai dengan adanya pengetahuan yang mumpuni seseorang tentang konsep-konsep dasar tentang keuangan yang meliputi pengetahuan tentang tingkat suku bunga, pengetahuan tentang inflasi, pemahaman tentang investasi dan pengetahuan tentang risiko keuangan.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK), literasi keuangan didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan kesadaran individu masyarakat tentang lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan yang ditawarkan pada lembaga tersebut. Otoritas Jasa keuangan berdasarkan hasil surveynya telah melakukan pemetaan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat literasi keuangannya menjadi *well literate*, *sufficient literate*, *less literate* dan *not literate*.

Golongan yang termasuk dalam kategori *well literate* merupakan kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan beserta produknya. Kelompok masyarakat ini terampil menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan

oleh lembaga keuangan. Golongan kedua adalah *sufficient literate*. Golongan ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan beserta produknya, namun kelompok ini belum terampil menggunakan produk dan jasa keuangan tersebut. Selanjutnya adalah kelompok *less literate*. Kelompok ini merupakan golongan masyarakat yang hanya sebatas memiliki pengetahuan tentang produk dan lembaga jasa keuangan. Adapun kelompok terakhir adalah *not literate*, kalangan ini merupakan masyarakat yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang produk dan lembaga keuangan yang tersedia (snki.go.id, 2018)

Bay, Catusús dan Johed (2014) mengemukakan bahwa literasi keuangan tidak dilihat hanya pada sebatas aspek kemampuan menulis, membaca dan memahami bahasa keuangan dan akuntansi. Akan tetapi, literasi keuangan merupakan keterampilan bidang keuangan yang harus dipelajari dan diimplementasikan dalam tataran praktis pada pengelolaan keuangan dengan menggunakan instrument keuangan yang tersedia.

Para ahli telah mengemukakan indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat literasi keuangan masyarakat. Bumcrot, Lin, and Lusardi (2013) mengemukakan bahwa terdapat lima komponen yang dapat digunakan untuk mengukur literasi keuangan. Kelima komponen tersebut antara lain tingkat suku bunga, inflasi, diversifikasi risiko, pengetahuan tentang obligasi dan hipotek. Kemampuan menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan indikator pengukuran literasi keuangan tersebut merupakan cerminan tingkat literasi keuangan masyarakat.

2.2 Penyebab Perbedaan Tingkat Literasi Keuangan

Beberapa faktor demografis yang menjadi faktor penyebab perbedaan tingkat literasi keuangan masyarakat antara lain faktor usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan (Kadoya dan Khan, 2020). Penelitian lainnya, Ahmad, Dalimunthe, Thahirah dan Aminah (2020) menjelaskan lebih lanjut tentang beberapa karakteristik demografis yang menjadi faktor pembeda literasi keuangan di kalangan masyarakat antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, dan tempat tinggal. Selain itu, aspek karakteristik personal yang meliputi *financial attitude* dan *financial behavior* juga menjadi faktor yang menentukan tingkat literasi keuangan.

Penelitian tentang literasi keuangan masyarakat agraris telah menjadi perhatian berbagai para pakar pada saat ini. Penelitian tersebut telah dilakukan pada berbagai negara. Akoto, Appiah dan Turkson (2017) meneliti tentang literasi keuangan petani Kakao di Ghana. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa beberapa karakteristik demografis petani menjadi faktor pembeda tingkat literasi keuangan. Beberapa karakteristik demografis tersebut antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan luas lahan pertanian yang dimiliki oleh petani. Selain faktor demografis, faktor psikografis juga berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan masyarakat.

Fakta lainnya tentang literasi keuangan dikemukakan dalam penelitian **Septiani, Sunarwan Yuliati dan Kirbrandoko (2011)** yang mengkonfirmasi bahwa faktor motivasi hedonis, nilai harga dan kebiasaan merupakan faktor yang terbukti berpengaruh terhadap minat petani mengadopsi *sharing economy peer-to-peer lending* sebagai alternatif pembiayaan pertanian di wilayah Jawa Barat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor psikografis berkontribusi terhadap peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat petani di tanah air.

Penelitian serupa lainnya juga telah dilakukan di tanah air. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat petani dan nelayan di Kota Surabaya masih sangat rendah. Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa mayoritas masyarakat nelayan tidak memahami instrumen-instrumen investasi yang tersedia pada berbagai lembaga keuangan. Masih banyak para petani dan nelayan yang belum dapat memanfaatkan produk

keuangan yang disediakan oleh industri perbankan. Petani dan nelayan beranggapan bahwa proses yang harus dilalui untuk memanfaatkan jasa keuangan yang disediakan oleh perbankan sangat rumit dan tidak praktis (Fatihudin, Sjamsul dan Iis, 2017). Kondisi ini merupakan hal harus segera menemukan solusi agar cita-cita inklusi keuangan yang ingin dicapai oleh pemerintah dapat terwujud.

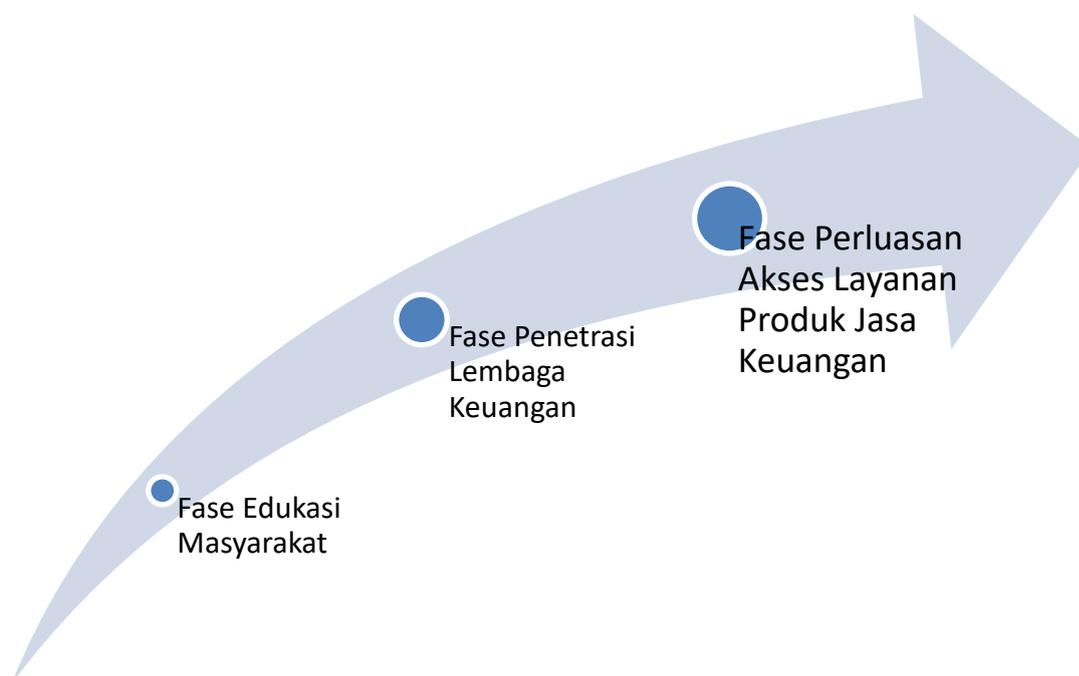
3. Metode Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap literature dan sumber sumber informasi yang relevan yang berkaitan dengan kondisi literasi keuangan masyarakat agraris. Berdasarkan hasil kajian literatur, penelitian ini menawarkan solusi berupa rencana strategi/*road map* peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat agraris.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Strategi/Road Map Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat

Peningkatan literasi keuangan masyarakat agraris dapat dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun. Target pencapaian selama proses tersebut adalah tercapainya tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat agraris. Strategi peningkatan literasi keuangan juga dilakukan secara paralel dengan upaya peningkatan inklusi keuangan pada masyarakat tersebut. *Road map* strategi pencapaian literasi keuangan masyarakat agraris dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut



Fase edukasi masyarakat merupakan tahap awal dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat agraris. Masa ini dilaksanakan selama setahun. Pada fase ini masyarakat agraris dibekali dengan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan literasi keuangan mereka. Para pihak yang berpotensi untuk berkolaborasi dalam fase ini adalah akademisi, media/*influencer* dan lembaga keuangan. Para akademisi dan *influencer* dalam fase ini berperan dalam rangka memberi edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan di bidang

keuangan. Adapun lembaga keuangan berperan dalam rangka menyusun *action plan* rencana strategis tindak lanjut hasil edukasi masyarakat berupa langkah-langkah percepatan penetrasi lembaga keuangan dan upaya perluasan akses layanan keuangan kepada masyarakat agraris melalui penawaran produk yang relevan dengan karakteristik pasar/masyarakat yang dituju.

Fase kedua berupa penetrasi lembaga keuangan kepada masyarakat agraris. Pada tahapan ini dilakukan penyediaan akses lembaga keuangan ke berbagai pelosok yang dapat dijangkau oleh masyarakat agraris. Lembaga keuangan perlu menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat baik berupa kantor fisik maupun berupa layanan *internet banking* yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat agraris. Fase ketiga dilakukan dengan cara mengoptimalkan peran perbankan dalam rangka menyediakan produk jasa keuangan yang sesuai dengan karakteristik bisnis dan kondisi sosiologis masyarakat agraris.

Fase pelaksanaan peningkatan inklusi keuangan di tanah air mempunyai penekanan yang berbeda. Fase pertama fokus pada edukasi masyarakat berupa pendidikan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan secara massif dengan melibatkan para ahli dari kalangan akademisi dan praktisi. Fase kedua berfokus pada penguatan jasa keuangan di sektor pemerintahan, perlindungan konsumen, peraturan dan infrastruktur. Adapun fase ketiga melakukan penekanan pada hak kepemilikan warga negara, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi.

4.2 Manfaat Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Agraris

Literasi keuangan berperan sangat penting dalam sebuah negara maupun daerah untuk membina masyarakat yang paham tentang lembaga jasa keuangan dan instrumen keuangan yang tersedia. Masyarakat yang paham tentang literasi keuangan akan berdampak terhadap kemakmurannya dan kesejahterannya (Hidajat, 2015). Faktor ini disebabkan karena masyarakat mampu mengelola keuangan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif.

Tingkat literasi keuangan yang baik dapat memandu masyarakat agraris dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha mereka. Beberapa jasa keuangan yang tersedia untuk dapat digunakan oleh masyarakat agraris seperti asuransi pertanian dan pendanaan di bidang kegiatan usaha tani. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung tertarik untuk menggunakan pembiayaan dan asuransi di bidang pertanian untuk memproteksi kegiatan usahanya

Masyarakat yang mempunyai tingkat literasi keuangan yang tinggi cenderung untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan. Sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat literasi keuangannya rendah tidak tertarik untuk mengakses produk jasa keuangan yang tersedia baik berupa pembiayaan maupun asuransi (Akter, Krupnik, Rossi, Khanam, 2016). Literasi keuangan yang tinggi bagi masyarakat agraris juga menjadi modal utama dalam rangka mewujudkan masyarakat petani dan nelayan yang *bankable*.

Hasil penelitian di Indonesia tentang literasi keuangan mengkonfirmasi bahwa tingkat literasi keuangan berdampak terhadap kemampuan masyarakat agraris dalam mengakses Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang digulirkan oleh pemerintah. (Widhiyanto, Nuryartono, Harianto dan Siregar, 2018). Masyarakat yang tergolong dalam kelompok literasi keuangan yang baik dapat dengan mudah mengakses kredit tersebut karena adanya pengetahuan yang memadai terhadap persyaratan yang dibutuhkan dan tata cara mengajukan kredit pada lembaga keuangan. Tingkat literasi keuangan masyarakat yang baik akan mendorong para petani untuk mengakses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan yang tersedia. Masyarakat yang paham dengan berbagai produk yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan akan dapat menyiapkan berbagai persyaratan teknis untuk memperoleh pendanaan dari perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Tingkat literasi keuangan juga berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Kondisi ini disebabkan oleh adanya kecenderungan masyarakat yang mempunyai literasi keuangan yang tinggi untuk melakukan investasi dan merencanakan keuangan untuk masa depan mereka. Selain itu, kegiatan investasi dan menabung yang mereka lakukan berkontribusi terhadap perkembangan industri keuangan (Bayar, Sezgin, Ozturk, dan Sasmaz, 2017). Kondisi tersebut juga dapat menjadi modal besar dalam rangka melakukan penetrasi lembaga keuangan di tengah masyarakat agraris.

Literasi keuangan juga berdampak terhadap perilaku keuangan masyarakat. Kemampuan di bidang keuangan dapat bermanfaat bagi mereka dalam mengatasi berbagai kesulitan keuangan yang dihadapi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peningkatan literasi keuangan sangat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan keuangan (Taft, Hosein, Mehrizi, dan Roshan, 2013). Masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang tinggi akan dapat memilih berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keuangan yang mereka hadapi ketika menjalankan kegiatan usaha.

4.2 *Technology Acceptance Model (TAM) dan Literasi Keuangan Masyarakat*

Pendekatan *technology acceptance model (TAM)* dapat digunakan sebagai teori dalam memahami fenomena kecenderungan masyarakat agraris dalam menggunakan teknologi informasi terkini untuk mengakses jasa layanan pada lembaga keuangan. Keinginan petani dalam mengakses teknologi informasi terbaru pada dasarnya sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka di bidang literasi keuangan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraannya.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan kajian tentang *technology acceptance model* dalam memahami peningkatan inklusi keuangan di negara berkembang. Gbongli, Xu dan Amedjonekou (2019) meneliti peran adopsi layanan keuangan berbasis digital dalam peningkatan inklusi keuangan di Togo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *perceived ease-of-use* (persepsi kemudahan penggunaan) merupakan faktor yang sangat signifikan dalam mempengaruhi minat masyarakat terhadap penggunaan layanan keuangan berbasis digital. Sedangkan dua variabel lainnya, yaitu *perceived usefulness* (kegunaan yang dirasakan) dan *personal innovativeness* juga mempengaruhi minat seseorang dalam mengadopsi layanan keuangan berbasis digital.

Mutahar dan Daud (2018) juga meneliti penelitian yang serupa tentang pendekatan *technology acceptance model (TAM)* terhadap penggunaan minat masyarakat menggunakan *mobile banking* di Yemen. Penelitian tersebut menggunakan variabel persepsi risiko dan kesadaran sebagai variabel independen yang mempengaruhi minat masyarakat dalam penggunaan layanan jasa keuangan berbasis internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran dapat mengurangi persepsi seseorang terhadap risiko dalam penggunaan layanan keuangan digital. Semakin rendah persepsi resiko seseorang terhadap penggunaan layanan keuangan berbasis internet, maka akan semakin meningkat persepsi terhadap kemudahan penggunaan layanan perbankan secara digital dan peningkatan persepsi terhadap kemanfaatan penggunaan layanan tersebut.

Pendekatan *technology acceptance model* dapat digunakan dalam memahami minat masyarakat agraris di Indonesia dalam mengadopsi layanan keuangan berbasis internet. Masyarakat agraris yang belum tersentuh dengan layanan keuangan digital perlu dikaji lebih lanjut berbagai faktor yang menjadi penyebab mereka enggan menggunakan teknologi tersebut. Harapannya, tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat agraris dapat meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam mengadopsi teknologi baru di bidang industri jasa keuangan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini hanya membahas pada ruang lingkup strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat agraris dan manfaatnya dalam rangka peningkatan kondisi perkonomian mereka. Peningkatan literasi keuangan mendorong masyarakat untuk meleak terhadap berbagai produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh perbankan. Pemahaman tersebut mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan produk jasa keuangan yang relevan sesuai kondisi bisnis mereka. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya secara sistematis untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat dalam tiga fase. Masing-masing fase pelaksanaannya adalah satu tahun. Peningkatan literasi keuangan juga mendorong para masyarakat agraris untuk menggunakan layanan *internet banking* yang disediakan oleh perbankan. Kondisi ini pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan inklusi keuangan sesuai dengan cita-cita pemerintah.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara melakukan riset lapangan dengan menggunakan data primer. Riset tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberi gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi terbaru literasi keuangan masyarakat agraris. Penelitian tersebut nantinya juga dapat memandu pemerintah dan perbankan dalam menyusun strategi penetrasi lembaga keuangan serta penyediaan akses layanan produk jasa keuangan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat agraris dan kebutuhan masyarakat agraris.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, G.N., Dalimunthe,S., Thahirah,S., & Aminah, H. (2020). Demographic Characteristics, Personality Characteristics and The Level Of Student's Financial Literacy. *Accounting*, 6(1) 629–636

Akoto, G.O., Appiah, K.O & Turkson, J.K, (2017). Financial Literacy Of Cocoa Farmers in Ghana. *Int. J. Accounting and Finance*,7(1) 11-30

Akter,S, Krupnik,T.J, Rossi,F. & Khanam,F. (2016). The Influence of Gender and Product Design on Farmers' Preferences for Weather-Indexed Crop Insurance. *Global Environmental Change*,38(1) 217–229

Bay, C., Catasús, B., & Johed, G. (2014). Situating financial literacy. *Critical Perspectives on Accounting*, 25(1), 36-45.

Bayar, Y., Sezgin, H. F., Öztürk, Ö. F., & Şaşmaz, M. (2017). Impact of Financial Literacy on Personal Saving: A Research on Usak University Staff. *Journal of Knowledge Management Economics and Information Technology*,6 (6) 1-19.

Bumcrot C. Lin J & Lusardi A (2013) The Geography of Financial Literacy. *Advancing Education in Quantitative Literacy*, 6(2), 1-16

Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. The World Bank.

Fatihudin, D., Hidayat, S & Holisin, L.(2017). The Model Grows The Society of Solving Through Financial Literates and Investment Portfolio on Fisheries-Traders in Surabaya

Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen

Volume 5 Nomor 2, 2021

ISSN : 2614-2147

Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*,7(5), 541-546

Gbongli, K 1., Xu, Y., Amedjonekou, K.M. (2019) Extended Technology Acceptance Model to Predict Mobile-Based Money Acceptance and Sustainability: A Multi-Analytical Structural Equation Modeling and Neural Network Approach. *Sustainability*, (11) 1-33

Hidajat, T. (2015). An Analysis of Financial Literacy and Household Saving among Fishermen in Indonesia. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6 (5) 216-222

Huston, S.J. (2010) Measuring Financial Literacy. *The Journal of Consumer Affairs*,4 (2), 296-316

Kadoya, Y & Khan, M.S.R (2020) What determines financial literacy in Japan? *Journal of Pension Economics and Finance*, 19 (1) 353–371

Mutahar, A.M., Daud, N.M., Thurasamy,R., Isaac, O., Abdul Salam, R. (2018) The Mediating of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use: The Case of Mobile Banking in Yemen. *International Journal of Technology Diffusion*, 9 (2) 21-40

Otoritas Jasa Keuangan (2019) Siaran Pers Survei Ojk 2019: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat. SP 58/DHMS/OJK/XI/2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Septiani, H.L.D., Sumarwan, U., Yuliati, L.N dan Kirbrandoko (2021) Minat Petani Mengadopsi *Sharing Economy Peer-To-Peer Lending* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11 (1) 1-21

SNKI (10 Februari 2018) Literasi Keuangan <https://snki.go.id/literasi-keuangan/>

Taft, M. K., Hosein, Z. Z., Mehrizi, S. M. T., & Roshan, A. (2013). The Relation Between Financial Literacy, Financial Wellbeing and Financial Concerns. *International Journal of Business and Management*, 8(11), 63.

Widhiyanto, I., Nuryartono, N, & Siregar, H. (2018) The Analysis of Farmers' Financial Literacy and its' Impact on Microcredit Accessibility with Interest Subsidy on Agricultural Sector. *International Journal of Economics and Financial Issues* 8(3), 148-159.